

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Hasil penemuan dari penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan terkait metode KPU Sleman dalam menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang Disabilitas di kabupaten Sleman dalam konteks demokrasi inklusif, yakni KPU menggunakan inovasi dibidang sosialisasi, memperkuat partisipasi masyarakat khususnya penyandang Disabilitas, serta memperkuat kolaborasi dengan Dinas Sosial dan organisasi-organisasi Disabilitas di Sleman. Pertama, kontribusi KPU Sleman dalam Pilkada Sleman tahun 2015 adalah dengan memberikan inovasi berupa diversifikasi atau keragaman alat sosialisasi, yakni dengan menggunakan Rumah Pintar Pemilu Sleman untuk sosialisasi dan pendidikan politik bagi segmen Pra-Pemula, Pemilih Pemula, segmen Perempuan, segmen Penyandang Disabilitas, segmen Keagamaan, segmen Kelompok Marjinal, serta segmen Daerah Rawan Konflik dan Bencana. Sebagai contoh kegiatan dari segmentasi masyarakat tersebut dengan KPU Sleman adalah dengan metode sosialisasi intensif yang pertama yakni melalui program inovatif dalam hal pendidikan yang dikenal dengan “Rumah Pintar Pemilu Sleman”. Kemudian yang kedua yakni, KPU Sleman menggunakan metode inovasi sosialisasi pendidikan pemilih bagi pelajar, dengan mengadakan Lomba Cerdas Cermat Kepemiluan dan Demokrasi, serta TTS (Teka-Teki Silang) Pemilu. Selanjutnya bentuk sosialisasi yang ketiga adalah, KPU Sleman menggunakan metode sosialisasi intensif melalui program “KPU Goes To School” dan “Rumah Pintar Pemilu Sleman Goes To Campus” yakni dengan

datang ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sleman semisal SMAN 1 Gamping, SMKN 1 Depok, Perguruan Tinggi UGM, UAJY dan lain-lain. Terakhir, inovasi sosialisasi intensif KPU Sleman yakni dengan program “KPU Goes To Community” yakni KPU mendatangi organisasi-organisasi penyandang Disabilitas seperti PERTUNI, PPDI, HWDI Sleman dan lain-lain.

Kedua, hasil temuan lain yang menarik dalam penelitian ini adalah KPU Sleman berhasil membuat inovasi alat peraga sendiri dengan menggunakan *audio visual* berupa VCD Sosialisasi Pilkada Sleman yang berisi pengenalan kandidat kepala daerah beserta visi-misinya, lengkap dengan peraga yang memakai bahasa isyarat bagi Tuna Rungu dan Wicara. Selain untuk Tuna RuWi, KPU Sleman juga menyesuaikan sosialisasi bagi jenis penyandang Disabilitas lain, misalnya dengan pemberian buku *braille* yang berisi penjelasan kandidat serta visi misi Calon Kepala Daerah bagi Tuna Netra. Selanjutnya KPU Sleman memberikan inovasi sosialisasi yakni dengan kegiatan belajar sambil bermain Permainan Ular Tangga Pemilu Raksasa RPPS, karena permainan tersebut terbilang mudah dipahami dan mudah untuk dimainkan bagi semua kalangan masyarakat, khususnya penyandang Disabilitas. Segala metode tersebutlah yang menjadikan KPU Sleman sebagai percontohan bagi KPU-KPU kabupaten lain, karena menggunakan metode sosialisasi program inovatif.

Bagaimanapun pentingnya sebuah penyelenggaraan Pemilihan Umum, aksesibilitas dapat mempengaruhi tingkat dan kualitas partisipasi penyandang Disabilitas, maka KPU Sleman harus memperkuat partisipasi penyandang Disabilitas untuk aktif dalam menciptakan Pemilu Inklusif. Karena, partisipasi dalam Demokrasi sangat vital, maka tanpa adanya partisipasi yang meluas akan

melemahkan Demokrasi. Maka dari itu KPU Sleman melakukan level pelatihan dan penyuluhan (*Training of Trainer*) yang beragam terkait Pemilihan bagi masyarakat serta petugas TPS. KPU memperbolehkan penyandang Disabilitas untuk aktif bergabung dalam Relawan Demokrasi. Kemudian KPU mengadakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik untuk para tokoh masyarakat misalnya tokoh-tokoh keagamaan dan lain-lain, serta kegiatan sosialisasi yang ditujukan kepada para ketua organisasi kedisabilitasian seperti PPDI, CIQAL, HWDI, SIGAB Indonesia, PERTUNI Sleman dan lain-lain agar mampu mendorong anggotanya secara massif dan berkelanjutan untuk kemudian disampaikan kembali kepada masyarakat yang lain. Hal tersebut, diharapkan efektif dalam menciptakan inklusifitas yang lebih nyata dalam ranah sosial, politik dan pendidikan. Meskipun, KPU Sleman dihadapkan dengan kendala Yuridis dan Non-Yuridis dalam pemenuhan aksesibilitas hak politik penyandang Disabilitas sangat kompleks.

Ketiga, yakni KPU memperkuat kolaborasi yang dilakukan atas kerjasama dengan beberapa lembaga pemerintah dan organisasi kedisabilitasian. KPU tidak bisa melakukan secara sepihak dalam menyediakan aksesibilitas, KPU Sleman membutuhkan peran aktif dari masyarakat dan organisasi disabilitas serta pemerintah. Maka dari itu, KPU Sleman menjalin kerjasama dengan PPDI Sleman, HWDI, PERTUNI, SIGAB, CIQAL, Dinas Sosial, dan Disdukcapil dalam penyelenggaraan Pilkada Sleman tahun 2015. Meskipun pada dasarnya, bentuk kolaborasi tersebut belum sepenuhnya benar-benar kuat dan masih terdapat kelemahan di dalamnya. KPU Sleman menjalin koordinasi dengan PPDI Sleman yakni, karena PPDI memiliki jaringan hingga ke lapisan

paling bawah di masyarakat. PPDI Sleman tidak hanya berada di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan akan tetapi juga berada di tingkat desa, sehingga pendataan dan pemenuhan kebutuhan penyandang Disabilitas jauh lebih akurat dan sesuai kebutuhan. Di sisi lain PPDI merupakan *partner* Dinsos Sleman dalam menjalankan tugasnya. Sehingga koordinasi antara KPU, Dinsos, dan PPDI Sleman akan lebih efektif dan efisien. Organisasi-organisasi disabilitas yang berkaitan dalam Pemilu harus mendorong Pemerintah, karena mereka memiliki peranan penting dalam terwujudnya Pemilu yang ramah Disabilitas di Kabupaten Sleman. Untuk menekankan kepada masyarakat dan pemerintah, bahwa penyandang Disabilitas bukanlah golongan masyarakat “kelas dua”, yakni dengan menjadikan isu-isu disabilitas tersebut sebagai arus isu sosial bersama. Karena, apabila setiap orang memahami isu disabilitas, maka dirinya akan jauh lebih peka terhadap lingkungan sosial dan lebih menghargai antar sesama tanpa saling merendahkan.

B. Saran

1. KPU Sleman harus memperbanyak jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas baik dan harus terus berinovasi dibidang sosialisasi, semakin memperkuat partisipasi masyarakat, sekaligus diperkuat lagi kolaborasinya dengan Dinas-dinas dan organisasi-organisasi Disabilitas di Kabupaten Sleman.
2. Petugas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) harus melibatkan masyarakat dan organisasi-organisasi Disabilitas ketika melakukan Panitia pencocokan dan penelitian (Coklit) secara rinci dengan mendatangi rumah ke rumah (*Door To Door*).
3. Kebijakan pemerintah harus diimplementasikan dengan baik, dan pemerintah harus spesifik mengatur masalah-masalah tertentu yang secara riil di lapangan sesuai apa yang dialami penyandang Disabilitas.
4. Membangun kesadaran terkait pemahaman isu-isu disabilitas seharusnya dimiliki oleh setiap individu, khususnya bagi para birokrat, parlemen, dan calon legislator (Lembaga Eksekutif dan Legislatif). Keberadaan isu-isu disabilitas seharusnya dijadikan sebagai arus sosial utama di segala aspek kehidupan bermasyarakat, khususnya di aspek sosial, politik, dan pendidikan.